

## UJIAN AKHIR SEMESTER

### MATA KULIAH EKONOMI PENDIDIKAN

---

Nama : Icha Fera Nika  
NPM : 2313031065  
Kelas : 2023 C  
Dosen Pengampu : Dr. Pujiati, M.Pd.  
Dr. Meyta Pritandhari, M.Pd.  
Fanni Rahmawati, M.Pd.

---

#### Soal 1 - Efisiensi Anggaran Pendidikan

Kasus :

Pemerintah Kabupaten A mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 30% dari APBD. Sebagian besar dana digunakan untuk pembangunan gedung sekolah baru, sedangkan pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan pengadaan media pembelajaran digital masih sangat terbatas. Setelah lima tahun, angka partisipasi sekolah meningkat, tetapi kualitas hasil belajar siswa tidak mengalami peningkatan signifikan.

- 1) Analisis penggunaan anggaran pendidikan pada kasus tersebut berdasarkan konsep efisiensi internal dan eksternal pendidikan.

Jawaban :

Pendidikan merupakan salah satu investasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Oleh karena itu, penggunaan anggaran pendidikan perlu dikelola secara efektif agar dapat menghasilkan kualitas pendidikan yang baik. Dalam menilai keberhasilan penggunaan anggaran pendidikan, terdapat dua konsep yang sering digunakan, yaitu efisiensi internal dan efisiensi eksternal. Kedua konsep ini membantu melihat apakah sumber daya yang digunakan dalam pendidikan sudah dimanfaatkan secara optimal dan apakah hasil pendidikan tersebut memberikan manfaat yang nyata bagi peserta didik maupun masyarakat.

Efisiensi internal berkaitan dengan bagaimana sumber daya yang digunakan dalam pendidikan, seperti anggaran, tenaga pendidik, dan fasilitas, dapat menghasilkan proses belajar yang baik serta prestasi belajar yang optimal. Sementara itu, efisiensi eksternal melihat apakah hasil pendidikan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik dan masyarakat, misalnya dalam dunia kerja, kehidupan sosial, maupun pembangunan daerah.

- a. **Efisiensi internal**, kebijakan anggaran Kabupaten A masih memiliki beberapa kelemahan. Memang, alokasi dana pendidikan sebesar 30% dari APBD menunjukkan bahwa pemerintah daerah memberikan perhatian besar terhadap sektor pendidikan. Namun, sebagian besar dana tersebut digunakan untuk membangun gedung sekolah baru. Padahal, kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kondisi fisik sekolah. Faktor lain seperti peningkatan kompetensi guru, pembaruan kurikulum, serta penyediaan media dan teknologi pembelajaran juga sangat penting.

Karena pelatihan guru tidak dilaksanakan secara maksimal, kurikulum tidak diperbarui, dan sarana pembelajaran digital masih terbatas, maka besarnya anggaran yang dikeluarkan belum mampu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Dengan kata lain, dana yang besar belum menghasilkan peningkatan mutu pendidikan yang sebanding. Kondisi ini menunjukkan penggunaan sumber daya yang kurang tepat sasaran sehingga efisiensi internal belum tercapai secara optimal.

- b. Dari sisi **efisiensi eksternal**, permasalahan yang muncul juga cukup penting. Setelah lima tahun, angka partisipasi sekolah memang meningkat, yang berarti semakin banyak anak yang mendapatkan akses pendidikan. Namun, peningkatan jumlah siswa yang bersekolah tidak diikuti oleh peningkatan kualitas hasil belajar. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan yang diberikan belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Akibatnya, lulusan sekolah belum tentu memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi lebih produktif, inovatif, dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Situasi seperti ini sering ditemukan di beberapa daerah yang menerima dana pendidikan dalam jumlah besar. Meskipun jumlah sekolah dan fasilitas fisik bertambah, kualitas pendidikan cenderung tidak mengalami perkembangan yang signifikan karena anggaran belum dikelola secara strategis sesuai kebutuhan utama pendidikan.

Dengan demikian, peningkatan anggaran pendidikan tidak hanya perlu difokuskan pada pembangunan sarana fisik, tetapi juga harus diimbangi dengan investasi pada kualitas guru, kurikulum, serta proses pembelajaran agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.

- 2) Jelaskan dampak kebijakan tersebut terhadap kualitas sumber daya manusia. Berikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif.

Jawaban :

Kebijakan anggaran pendidikan yang kurang tepat sasaran dapat memberikan dampak yang besar terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dihasilkan. Meskipun pembangunan fasilitas sekolah penting, kualitas pendidikan tetap sangat bergantung pada proses pembelajaran yang berlangsung di dalamnya. Oleh karena itu, anggaran pendidikan perlu digunakan secara seimbang antara pembangunan sarana fisik dan peningkatan kualitas pembelajaran agar mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Dampak yang paling terlihat dari kebijakan anggaran tersebut adalah menurunnya kualitas SDM yang dihasilkan. Dalam jangka pendek, siswa tidak memperoleh pengalaman belajar yang optimal karena guru yang mengajar mereka jarang mendapatkan pelatihan atau pengembangan kompetensi. Akibatnya, metode pembelajaran yang digunakan cenderung sama dari tahun ke tahun dan kurang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman maupun kebutuhan siswa saat ini. Selain itu, keterbatasan media pembelajaran digital membuat siswa kurang terbiasa menggunakan teknologi dalam proses belajar. Padahal, kemampuan literasi digital telah menjadi salah satu keterampilan dasar yang sangat dibutuhkan di berbagai bidang pekerjaan.

Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan masalah pembangunan yang lebih serius. Daerah yang terus menghasilkan lulusan dengan kemampuan dan keterampilan yang rendah akan kesulitan menciptakan tenaga kerja yang kompetitif. Akibatnya, peluang investasi menjadi lebih kecil karena perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kualitas memadai. Jika kondisi tersebut terus berlangsung, daerah akan semakin bergantung pada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat serta mengalami kesulitan untuk mencapai kemandirian ekonomi. Pengalaman di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa program peningkatan kualitas guru, seperti Program Guru Penggerak, memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan hasil belajar siswa dibandingkan hanya berfokus pada pembangunan atau renovasi fisik sekolah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kabupaten A perlu melakukan beberapa langkah perbaikan kebijakan.

1. Pemerintah daerah perlu meninjau kembali alokasi anggaran pendidikan dengan memberikan porsi yang lebih besar untuk peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, workshop, pendampingan, dan kegiatan komunitas belajar antar guru.

2. Pengembangan kurikulum perlu melibatkan praktisi, dunia usaha, dan berbagai pihak terkait agar materi pembelajaran lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.
3. Penyediaan media dan teknologi pembelajaran digital harus menjadi prioritas karena teknologi saat ini merupakan bagian penting dari proses pembelajaran modern.

Dengan demikian, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari banyaknya gedung sekolah yang dibangun, tetapi lebih penting lagi dari kualitas peserta didik yang dihasilkan. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu membentuk generasi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk berkontribusi bagi pembangunan masyarakat dan daerahnya.

## **Soal 2 – Ketimpangan Akses Pendidikan**

Kasus :

Sekolah di wilayah perkotaan memiliki laboratorium lengkap, akses internet cepat, dan guru profesional. Sebaliknya, sekolah di daerah pedesaan mengalami kekurangan guru, fasilitas minim, dan keterbatasan teknologi. Akibatnya, hasil ujian siswa di desa jauh lebih rendah dibandingkan siswa di kota.

- 1) Jelaskan bentuk ketimpangan pendidikan pada kasus tersebut.

Jawaban :

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara dan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, dalam praktiknya masih terdapat perbedaan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Ketimpangan ini tidak hanya terlihat dari fasilitas sekolah, tetapi juga dari kualitas tenaga pendidik dan hasil belajar siswa. Jika kondisi tersebut terus berlangsung, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga dapat memengaruhi pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Berdasarkan kasus yang telah di sampaikan, Berikut beberapa bentuk ketimpangan pendidikan antara kota dan desa dapat dilihat dari beberapa aspek yang saling berkaitan:

1. Terdapat ketimpangan dalam ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Sekolah-sekolah di perkotaan umumnya memiliki fasilitas yang lebih lengkap, seperti laboratorium, perpustakaan yang memadai, serta akses internet yang mendukung proses pembelajaran. Sebaliknya, banyak sekolah di pedesaan yang masih memiliki keterbatasan fasilitas, bahkan ada yang belum memiliki perpustakaan yang layak maupun akses internet yang memadai. Kondisi ini membuat siswa di desa memiliki kesempatan belajar yang lebih terbatas dibandingkan siswa di kota.

2. Terdapat ketimpangan dalam ketersediaan dan kualitas tenaga pendidik. Banyak guru profesional lebih memilih mengajar di daerah perkotaan karena fasilitas hidup yang lebih baik, peluang pengembangan karier yang lebih besar, serta akses yang lebih mudah terhadap berbagai pelatihan pendidikan. Akibatnya, sekolah-sekolah di pedesaan sering mengalami kekurangan guru, termasuk untuk mata pelajaran penting seperti Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Bahkan, tidak sedikit guru yang ditempatkan di desa berusaha pindah ke kota setelah beberapa waktu mengajar.
  3. Ketimpangan berdampak pada hasil belajar siswa. Secara umum, prestasi akademik siswa di desa sering kali lebih rendah dibandingkan siswa di kota. Hal ini bukan karena kemampuan siswa desa lebih rendah, melainkan karena mereka belajar dalam kondisi yang kurang mendukung. Keterbatasan guru, buku pelajaran, fasilitas belajar, dan teknologi membuat mereka tidak memperoleh kesempatan belajar yang sama dengan siswa di perkotaan.
- 2) Analisis dampak ekonomi jangka panjang dari ketimpangan pendidikan. Usulkan solusi kebijakan untuk mengurangi ketimpangan tersebut.

Jawaban :

Ketimpangan pendidikan yang berlangsung dalam jangka panjang dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi yang semakin besar. Pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kesempatan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan meningkatkan taraf hidupnya. Ketika kualitas pendidikan di desa lebih rendah dibandingkan di kota, maka peluang masyarakat desa untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik juga menjadi lebih kecil.

Akibatnya, mobilitas sosial masyarakat menjadi terhambat. Anak-anak yang tumbuh di daerah dengan kualitas pendidikan rendah akan menghadapi persaingan yang lebih berat ketika memasuki dunia kerja. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperlebar kesenjangan ekonomi antara masyarakat perkotaan dan pedesaan.

Selain itu, ketimpangan pendidikan juga dapat menghambat pembangunan nasional. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar dan sebagian besar tinggal di luar wilayah perkotaan. Jika kualitas pendidikan di daerah-daerah tersebut terus tertinggal, maka potensi sumber daya manusia yang dimiliki bangsa tidak dapat berkembang secara optimal. Akibatnya, bonus demografi yang seharusnya menjadi peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi justru dapat menjadi tantangan karena banyak tenaga kerja yang belum memiliki keterampilan yang dibutuhkan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan kebijakan yang lebih terarah dan berkeadilan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memberikan alokasi anggaran pendidikan yang lebih besar kepada daerah-daerah yang masih tertinggal. Dengan cara ini, daerah yang memiliki keterbatasan fasilitas dan tenaga pendidik dapat memperoleh dukungan yang lebih sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, pemerintah perlu memberikan berbagai insentif kepada guru agar bersedia mengajar dan bertahan di daerah pedesaan. Insentif tersebut tidak hanya berupa tambahan penghasilan, tetapi juga kesempatan pengembangan karier, pelatihan profesional, serta peningkatan kualitas hidup bagi guru dan keluarganya.

Pemerintah juga perlu mempercepat pembangunan infrastruktur digital di wilayah pedesaan. Akses internet dan teknologi pembelajaran sangat penting dalam era digital karena dapat membantu siswa memperoleh sumber belajar yang lebih luas dan berkualitas. Dengan tersedianya konektivitas yang baik, kesenjangan pendidikan antara kota dan desa dapat dikurangi secara bertahap. Untuk itu, upaya mengatasi ketimpangan pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh melalui perbaikan fasilitas, pemerataan tenaga pendidik, dan penguatan akses teknologi. Langkah-langkah tersebut penting untuk menciptakan kesempatan pendidikan yang lebih adil serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

### **Soal 3 – Pengangguran Terdidik**

Kasus :

Jumlah lulusan perguruan tinggi di Kota B meningkat setiap tahun. Namun, banyak lulusan menganggur atau bekerja tidak sesuai bidang studinya. Dunia industri menilai kompetensi lulusan belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

- 1) Analisis penyebab pengangguran terdidik berdasarkan teori human capital.

Jawaban :

Teori Human Capital menjelaskan bahwa pendidikan merupakan bentuk investasi bagi individu. Seseorang mengeluarkan waktu, tenaga, dan biaya untuk memperoleh pendidikan dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan penghasilan yang lebih tinggi di masa depan. Menurut teori yang dikembangkan oleh Theodore Schultz dan Gary Becker, pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga produktivitas dan peluang kerja seseorang menjadi lebih baik.

Namun, kondisi di Kota B menunjukkan bahwa investasi pendidikan tidak selalu menghasilkan manfaat yang diharapkan. Meskipun jumlah lulusan perguruan tinggi terus

meningkat setiap tahun, angka pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi juga ikut bertambah. Dalam perspektif teori Human Capital, kondisi ini terjadi karena kompetensi yang dimiliki lulusan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Akibatnya, pendidikan yang telah ditempuh belum mampu memberikan nilai tambah yang cukup bagi mereka dalam memasuki pasar kerja.

Salah satu penyebab utama masalah ini adalah orientasi pendidikan yang masih lebih menekankan teori dibandingkan praktik. Banyak program studi yang belum menyesuaikan kurikulumnya dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri yang terus berubah. Akibatnya, lulusan memiliki pengetahuan akademik yang cukup, tetapi kurang memiliki keterampilan praktis yang dibutuhkan di dunia kerja. Selain itu, sebagian mahasiswa memilih program studi tanpa mempertimbangkan minat, bakat, maupun prospek kerja yang tersedia. Keputusan tersebut sering kali menyebabkan ketidaksesuaian antara bidang pendidikan yang ditempuh dengan kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor industri.

2) Jelaskan hubungan antara pendidikan dan pasar kerja pada kasus tersebut.

Jawaban :

Pada kondisi yang ideal, perguruan tinggi berperan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Di sisi lain, pasar kerja menyediakan kesempatan bagi lulusan untuk bekerja, berkembang, dan memberikan kontribusi bagi perekonomian. Namun, dalam kasus Kota B, hubungan antara pendidikan dan pasar kerja belum berjalan secara optimal. Jumlah lulusan perguruan tinggi yang terus meningkat tidak diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja yang memadai. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kelebihan tenaga kerja terdidik (*oversupply*), sehingga persaingan dalam memperoleh pekerjaan menjadi semakin ketat. Perusahaan tidak hanya mempertimbangkan ijazah, tetapi juga menilai keterampilan, pengalaman, dan kemampuan calon pekerja dalam menyelesaikan tugas secara nyata. Banyak lulusan mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan karena selama masa perkuliahan mereka belum memiliki pengalaman kerja yang cukup. Akibatnya, mereka kurang mampu menunjukkan kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan beberapa langkah perbaikan.

1. Perguruan tinggi perlu memperkuat kerja sama dengan dunia industri agar mahasiswa memperoleh pengalaman kerja melalui program magang yang terstruktur dan relevan.

2. Kurikulum perlu disusun dengan melibatkan pihak industri sehingga materi yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
3. Perguruan tinggi perlu mendorong pengembangan kewirausahaan agar lulusan tidak hanya berorientasi mencari pekerjaan, tetapi juga mampu menciptakan usaha dan lapangan kerja baru.

Selain itu, perguruan tinggi juga perlu menyediakan sertifikasi kompetensi atau micro-credential yang diakui oleh industri. Sertifikasi tersebut dapat menjadi bukti bahwa lulusan memiliki keterampilan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan langkah-langkah tersebut, relevansi antara pendidikan tinggi dan kebutuhan pasar kerja dapat meningkat sehingga peluang kerja bagi lulusan menjadi lebih baik.

#### **Soal 4 – Kenaikan Biaya Pendidikan**

Kasus :

Sebuah universitas swasta menaikkan uang kuliah sebesar 25% untuk meningkatkan fasilitas kampus dan layanan akademik. Kebijakan tersebut mendapat protes dari mahasiswa karena dinilai memberatkan keluarga berpenghasilan rendah.

- 1) Analisis kasus tersebut berdasarkan konsep pendidikan sebagai barang publik dan barang privat.

Jawaban :

Dalam ilmu ekonomi, barang publik adalah barang yang manfaatnya dapat dinikmati banyak orang dan tidak mudah dibatasi hanya untuk pihak tertentu. Sebaliknya, barang privat adalah barang yang hanya dapat digunakan oleh orang yang mampu membayar atau membelinya.

Pendidikan tinggi memiliki karakteristik yang berada di antara barang publik dan barang privat. Di satu sisi, pendidikan memberikan manfaat bagi individu yang menempuhnya, seperti peluang kerja yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi. Namun, pendidikan juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas, seperti meningkatnya kualitas sumber daya manusia, produktivitas ekonomi, inovasi, dan kesadaran sosial. Oleh karena itu, pendidikan memiliki unsur barang publik yang kuat dan perlu mendapat dukungan dari pemerintah.

Namun, ketika biaya kuliah terus meningkat, akses terhadap pendidikan tinggi menjadi semakin terbatas bagi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi rendah. Dalam kondisi ini, pendidikan lebih cenderung diperlakukan sebagai barang privat karena hanya dapat diakses oleh mereka yang mampu membayar. Akibatnya, kesempatan untuk

melanjutkan pendidikan tinggi tidak lagi ditentukan oleh kemampuan akademik, tetapi juga oleh kondisi ekonomi keluarga.

- 2) Jelaskan dampak sosial ekonomi dari kenaikan biaya pendidikan.

Jawaban :

Kenaikan biaya pendidikan dapat menimbulkan berbagai dampak sosial dan ekonomi. Dari sisi sosial, biaya kuliah yang semakin tinggi dapat memperlebar kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu dan yang kurang mampu. Keluarga dengan kondisi ekonomi baik tetap dapat membiayai pendidikan anak-anaknya, sedangkan keluarga yang kurang mampu sering kali harus menunda, membatalkan, atau memilih pendidikan yang lebih murah meskipun tidak sesuai dengan minat dan potensi anak. Kondisi tersebut dapat menghambat mobilitas sosial karena pendidikan yang seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan taraf hidup menjadi lebih sulit dijangkau oleh sebagian masyarakat.

Dari sisi ekonomi, kenaikan biaya pendidikan dapat menyebabkan berkurangnya jumlah mahasiswa berbakat yang melanjutkan pendidikan tinggi karena keterbatasan biaya. Padahal, mereka memiliki potensi untuk berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi dan inovasi di masa depan. Selain itu, mahasiswa yang harus bekerja untuk membiayai kuliahnya sering kali mengalami kesulitan membagi waktu antara pekerjaan dan studi sehingga proses belajar menjadi kurang optimal.

- 3) Apakah pemerintah perlu melakukan intervensi? Jelaskan alasannya.

Jawaban :

Pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga agar pendidikan tetap dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Tanpa campur tangan pemerintah, biaya pendidikan berpotensi terus meningkat sehingga semakin banyak masyarakat yang kesulitan memperoleh pendidikan tinggi. Selain itu, pendidikan merupakan hak setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan tidak hanya dimiliki oleh kelompok masyarakat yang mampu secara ekonomi.

Bentuk intervensi yang perlu dilakukan mencakup penguatan regulasi tentang batas kenaikan biaya pendidikan agar tidak membebani masyarakat secara sewenang-wenang, perluasan program beasiswa yang berbasis kebutuhan ekonomi bukan sekadar prestasi akademik, pengembangan skema pembiayaan kuliah yang lunak dengan cicilan yang

disesuaikan dengan kemampuan pendapatan setelah lulus, serta pengawasan agar universitas yang menerima bantuan pemerintah tetap menjalankan misi sosialnya. Intervensi ini bukan bentuk intervensi yang membelenggu melainkan bentuk kehadiran negara yang memastikan bahwa pendidikan tetap menjadi hak, bukan komoditas.

Kemudian beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah antara lain mengatur kenaikan biaya pendidikan agar tetap terjangkau, memperluas program beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu, menyediakan skema pembiayaan pendidikan yang ringan dan mudah diakses, serta melakukan pengawasan terhadap perguruan tinggi agar tetap menjalankan fungsi sosialnya. Dengan adanya kebijakan tersebut, pendidikan tinggi dapat tetap menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas kesempatan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik.

### **Soal 5 – Digitalisasi Pembelajaran**

Kasus :

Pasca pandemi, sekolah menerapkan pembelajaran berbasis digital. Namun, siswa dari keluarga kurang mampu mengalami kesulitan membeli perangkat dan kuota internet sehingga partisipasi belajar menurun.

- 1) Analisis masalah tersebut menggunakan konsep biaya pendidikan dan *opportunity cost*.

Jawaban :

Perkembangan teknologi dan penerapan pembelajaran digital setelah pandemi telah mengubah bentuk biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh keluarga. Jika sebelumnya biaya pendidikan umumnya mencakup uang sekolah, buku, seragam, dan transportasi, kini siswa juga membutuhkan perangkat digital seperti ponsel, tablet, atau laptop serta akses internet yang memadai. Bagi keluarga dengan kondisi ekonomi yang baik, kebutuhan ini mungkin tidak menjadi masalah. Namun, bagi keluarga berpenghasilan rendah, biaya tambahan tersebut dapat menjadi hambatan untuk memperoleh pendidikan yang setara.

Pengalaman selama pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Sebagian siswa harus menggunakan ponsel milik orang tua yang hanya dapat dipakai pada waktu tertentu. Ada juga yang harus berbagi perangkat dengan saudara-saudaranya, bahkan ada yang tidak dapat mengikuti pembelajaran daring karena tidak memiliki perangkat maupun akses internet. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses terhadap teknologi telah menjadi faktor penting dalam keberhasilan belajar.

Untuk memahami situasi tersebut, konsep *opportunity cost* atau biaya peluang dapat digunakan. *Opportunity cost* adalah nilai dari pilihan yang harus dikorbankan ketika seseorang memilih suatu tindakan. Misalnya, keluarga dengan pendapatan terbatas harus memilih antara membeli kuota internet untuk kebutuhan belajar anak atau memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Ketika salah satu pilihan diambil, ada kebutuhan lain yang harus dikorbankan. Dalam banyak kasus, keterbatasan ekonomi menyebabkan pendidikan menjadi pilihan yang terabaikan karena kebutuhan dasar dianggap lebih mendesak.

Selain dampak jangka pendek, terdapat pula biaya peluang dalam jangka panjang. Siswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik akan tertinggal dalam memahami materi pelajaran. Ketertinggalan tersebut dapat terus berlanjut karena materi pembelajaran saling berkaitan. Semakin besar ketertinggalan yang dialami, semakin sulit bagi siswa untuk mengejar kemampuan teman-temannya. Inilah yang sering disebut sebagai dampak tersembunyi dari ketidakmerataan akses terhadap teknologi pendidikan.

- 2) Jelaskan dampak kesenjangan digital terhadap kualitas pendidikan. Berikan solusi kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut.

Jawaban :

Kesenjangan digital terjadi ketika sebagian siswa memiliki akses yang baik terhadap teknologi dan internet, sementara sebagian lainnya tidak. Kondisi ini dapat menyebabkan perbedaan kualitas belajar yang semakin besar. Siswa yang memiliki akses teknologi dapat memanfaatkan berbagai sumber belajar seperti video pembelajaran, latihan interaktif, materi tambahan, dan komunikasi daring dengan guru. Sebaliknya, siswa yang memiliki keterbatasan akses akan mengalami kesulitan mengikuti proses pembelajaran secara optimal.

Akibatnya, perbedaan kemampuan belajar antar siswa menjadi semakin lebar. Kondisi ini bukan disebabkan oleh perbedaan tingkat kecerdasan, melainkan oleh perbedaan kesempatan dalam mengakses sumber belajar. Jika berlangsung dalam waktu yang lama, siswa yang terus tertinggal dapat kehilangan motivasi dan kepercayaan diri dalam belajar. Mereka mungkin merasa tidak mampu mengikuti pelajaran, padahal masalah utamanya adalah keterbatasan akses terhadap teknologi dan fasilitas pendidikan.

Dalam jangka panjang, kesenjangan digital juga dapat meningkatkan risiko putus sekolah. Selain itu, siswa yang tidak terbiasa menggunakan teknologi akan menghadapi kesulitan ketika memasuki dunia kerja, karena saat ini hampir semua sektor pekerjaan

membutuhkan kemampuan digital dasar. Dengan demikian, kesenjangan pendidikan yang terjadi saat ini berpotensi berkembang menjadi kesenjangan ekonomi di masa depan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan berbagai kebijakan yang mendukung pemerataan akses pendidikan digital. Pertama, pemerintah perlu menyediakan bantuan perangkat dan subsidi internet secara berkelanjutan bagi siswa yang membutuhkan. Kedua, pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah yang masih memiliki keterbatasan jaringan harus dipercepat agar seluruh siswa dapat mengakses layanan pendidikan digital. Ketiga, sekolah perlu menerapkan metode pembelajaran yang fleksibel dan tidak sepenuhnya bergantung pada internet. Penggunaan modul cetak, siaran pendidikan melalui televisi atau radio, serta pembelajaran campuran dapat menjadi alternatif bagi siswa yang memiliki keterbatasan akses. Keempat, guru perlu mendapatkan pelatihan untuk merancang pembelajaran yang dapat menjangkau seluruh siswa dengan kondisi yang beragam.

Dengan demikian, digitalisasi pendidikan dapat memberikan manfaat yang lebih merata apabila didukung oleh akses teknologi yang setara, kebijakan yang tepat, serta sistem pembelajaran yang mampu mengakomodasi kebutuhan semua peserta didik.